

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hamid. (2007). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah Edisi Revisi*. Salemba Empat.
- Amelia, V., & Farouq Ishak, J. (2023). *Pengaruh Kontribusi Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Hotel, Dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Cimahi*. <https://doi.org/10.22225/kr.14.2.2023.250-262>
- Anasta, L., & Nengsih. (2019). *Peranan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Pada Kabupaten dan Kota di Jawa Barat)*. <https://doi.org/10.22441/profita.2019>
- Badan Litbang Depdagri RI dan FISIPOL - UGM. (1991). *Pengukuran Kemampuan Keuangan Daerah Tingkat II Dalam Rangka Otonomi Daerah Yang Nyata Dan Bertanggung Jawab*. Universitas Gadjah Mada.
- Bapenda Jabar. (2016, January 22). *Pajak Sumber Penerimaan Negara*. <https://bapenda.jabarprov.go.id/2016/01/22/pajak-sumber-penerimaan-negara/>
- Djajaningrat. (2014). *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat.
- Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). *Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Returns*. <https://doi.org/10.1177/031289629101600103>
- Eka Putri, S., Priyagus, & Budi Suharto, R. (2019). *Kontribusi dan Efektifitas Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Dan Kabupaten Kutai Timur*. <http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/JIEM>
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 26 Edisi 10*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hadi Kusumo Yuwono, F. (2012). *Analisis Potensi Dan Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang)*.
- Kusumaningrum, A. (2021). *Pengaruh Kontribusi Pajak Restoran, Pajak Hotel, dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Empiris di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014-2019)*.
- Mahmudi. (2016). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.

- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Penerbit Andi.
- Maryana, D., & Yuniar Larasati, A. (2021). *Pengaruh Kontribusi Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Bappenda Kota Cimahi)*.
- Meisa Farina, T., Ilat, V., & Wangkar, A. (2020). *Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Air Tanah Sebagai Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Kota Ternate*.
- Nurhafiani. (2020). *Pengaruh Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Studi Kasus di Kabupaten Pasaman Barat*.
- PERBUP Semarang No. 86 Tahun 2020 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah. (2020). *Peraturan Bupati Semarang Nomor 86 Tahun 2020 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah*.
- PERGUB Jawa Tengah No. 19 Tahun 2017 Tentang Pedoman Perhitungan Harga Dasar Air. (2017). *Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pedoman Perhitungan Harga Dasar Air Untuk Menghitung Nilai Perolehan Air Tanah Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah*.
- Rahmadini, N., & Kurniawan, B. (2022). *Pengaruh Kontribusi Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta*.
- Resmi, S. (2014). *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 8*. Salemba Empat.
- Safitri Sihite, D., & Citra Mulyandani, V. (2021). *Pengaruh Kontribusi Pajak Hiburan dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Humbang Hasundutan*.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Penerbit Alfabeta.
- Suha Bahmid, N., & Wahyudi, H. (2018). *Pengaruh Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Hiburan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan*.
- Tamburaka, S., Husin, & Anang Dwiatmojo, Muh. (2020). *Pengaruh Pajak Penerangan Jalan Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Kabupaten/Kota Se Provinsi Sulawesi Tenggara)*. <http://ojs.uho.ac.id/index.php/jak-uho>
- Tawarutubun, P. (2020). *Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel Dan Pajak Air Tanah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun 2008-2019 Di Kota Surabaya*.

- UU No. 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah. (2022). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.*
- UU No. 7 Tahun 2021 Tentang HPP. (2021). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.*
- UU No. 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Pengganti UU No. 5 Tahun 2008. (2009). *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang.*
- UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.*